

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 205 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
5. Keputusan Presiden Nomor 122/TPA Tahun 2022 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan, identifikasi, dan inventarisasi Barang Milik Negara yang tercantum pada Daftar Barang di LKPP;
- b. melaporkan hasil pendataan dan identifikasi Barang Milik Negara ke Sekretaris Utama melalui Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum; dan
- c. menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Oktober 2022

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
TENTANG TIM PELAKSANA
INVENTARISASI BARANG MILIK
NEGARA PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 205 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 OKTOBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
1	Pengarah	Sarah Sadiqa	Plt. Kepala LKPP
2	Penanggung Jawab	Robin Asad Suryo	Sekretaris Utama
3	Ketua	Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
4	Anggota	1. Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		2. Banjar Laga	Biro Perencanaan dan
		3. Joanne Salres Ramadhani	Keuangan
		4. Muhammad Sukron Arif	Biro Hukum,
		5. Aprian Mustofa Hasan	Organisasi, dan Sumber
		6. Mahatmya Widyasri	Daya Manusia

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		7. Sulmiari 8. Mia Diana Putri Suryadi 9. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 10. Deddy Andrianto 11. Mulyadi 12. Nur Hartoyo 13. Adi Irawan 14. Gendy Marthatomo Rachmanto 15. Hans Heru Troyas 16. Atama Rena Perdana 17. Haniyah Berliana Putri 18. Andi Setya Nugraha 19. Doddy Pascal 20. Gunawan Syarifah Arif	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		21. Rinaldy Prihandoko 22. Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Inspektorat
		23. Yoga Nurdani 24. Setiaji Santoso 25. Didin Rusyad Nurdin 26. Ahmad Fauzi	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		27. Andi Rannualdi 28. Dandy Darmawan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		29. Lingga Sakti 30. Erwinsyah Negara	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		31. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim
		32. Aditya Mahfuzha	Usaha dan Kerjasama Internasional
		33. Iswan Huntoyungo	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		34. Adi Afrianto	
		35. Pandu Taruna Kristianto Guterres	
		36. Candra Simon Septyan	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		37. Muhammad Amri Satria	
		38. Elmario Ramon	
		39. Fuady Satria	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		40. Muhammad Amri Satria	
		41. Galuh Arini Sasi Kirono	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		42. Fadliyadi Jezria	
		43. Lutfi Prafidya Ferisa	
		44. Bernadus Sayratu Kuway	Direktorat Sertifikasi Profesi
		45. Fajar Dwi Saptono	
		46. Aisyah Khoirun Nisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		47. Joko Budi Sulistyono	
		48. Aryandhika Sandya Nugraha	
		49. Paramitha Agdina Pusparini	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		50. Diani Bahri Puteri	
		51. Eko Nirwanto Putro Hanardi	

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		52. Jefry Seftian 53. Tinta Nurvitania 54. Carolina Maria Anggreini 55. Moch. Ilham Riswanda	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA